



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 01 TAHUN 2009  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Bupati Bantul telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1930;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

- 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara nomor 4048)
  4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3688);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
  7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
  8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
  9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
  10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
  11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara nomor 4502);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Dana Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2007);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 8 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 829.474.653.164,38	
2. Belanja	<u>Rp. 888.818.903.466,00</u>	
Surplus/defisit		Rp. (59.344.250.301,62)
3. Pembiayaan		
• Penerimaan	Rp. 62.134.481.301,62	
• Pengeluaran	Rp. 2.790.231.000,00	
Pembiayaan netto		Rp. <u>59.344.250.301,62</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		R p. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah Rp. 65.991.513.134,38
  - Dana Perimbangan Rp. 656.885.490.000,00
  - Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 106.597.650.030,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Pajak daerah Rp. 13.000.000.000,00
  - Retribusi daerah Rp. 38.366.191.550,00
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 5.272.647.631,90
  - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 9.352.673.952,48
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- Dana Bagi Hasil Rp. 32.740.490.000,00
  - Dana Alokasi Umum Rp. 568.510.000.000,00
  - Dana Alokasi Khusus Rp. 55.635.000.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp.	0,00
b. Dana Darurat	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	41.216.251.900,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	13.930.427.930,00
e. Dana Penyesuaian Infrastruktur dan lainnya	Rp.	46.545.831.000,00
f. Dana Tunjangan Pendidikan	Rp.	4.905.139.200,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 609.777.817.771,00 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | 279.041.085.695,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai                              | Rp. | 533.231.014.246,00 |
| b. Belanja Bunga                                | Rp. | 120.145.200,00     |
| c. Belanja Subsidi                              | Rp. | 30.000.000,00      |
| d. Belanja Hibah                                | Rp. | 7.225.272.000,00   |
| e. Belanja Bantuan Sosial                       | Rp. | 39.119.541.000,00  |
| f. Belanja Bagi hasil Kepada Prop/Kab/kota/Desa | Rp. | 3.907.026.900,00   |
| g. Belanja bantuan Keuangan                     | Rp. | 24.523.636.200,00  |
| h. Belanja Tidak Terduga                        | Rp. | 1.621.182.225,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 42.278.013.550,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 113.333.563.495,00 |
| c. Belanja Modal           | Rp. | 123.429.508.650,00 |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |                |     |                   |
|----------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan  | Rp. | 62.134.481.301,62 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 2.790.231.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
|  | Rp. | 62.134.481.301,62 |
|--|-----|-------------------|
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah | Rp. | 2.675.000.000,00 |
| b. Pembayaran pokok Utang                         | Rp. | 115.231.000,00   |

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Rincian APBD dan Sisa Perhitungan Tahun sebelumnya

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 3. Lampiran III   | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan.  |
| 4. Lampiran IV    | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan.  |
| 5. Lampiran V     | Rekapitulasi Belanja daerah dan Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2009; |
| 6. Lampiran VI    | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan  |
| 7. Lampiran VII   | Daftar Piutang Daerah   |
| 8. Lampiran VIII  | Daftar Penyertaan Modal (Investasi ) Daerah   |
| 9. Lampiran IX    | Daftar Pinjaman Daerah  |
| 10. Lampiran X    | Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;  |
| 11. Lampiran XI   | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;   |
| 12. Lampiran XII  | Daftar Dana Cadangan Daerah;dan   |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.   |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Januari 2009

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTA,KD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 1 TAHUN 2009